

KOMPARASI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Roberto Akyuwen

Analisis Eksekutif Senior pada DKB IV Otoritas Jasa Keuangan

Caroline Mangowal

Direktur dan Peneliti RISE

Abstrak

Tingkat inklusi keuangan menggambarkan partisipasi publik atau akses produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan di suatu negara. Akses seperti itu dipandang penting, karena menggambarkan peluang kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, apakah peningkatan kondisi untuk inklusi keuangan sejalan dengan peningkatan indikator pembangunan di Indonesia? Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan ini. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia di Otoritas Jasa Keuangan dan Biro Pusat Statistik. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peningkatan inklusi keuangan ternyata belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap banyak indikator pembangunan Indonesia. Berbagai perbaikan diperlukan agar peningkatan inklusi keuangan dapat ditransmisikan secara efektif untuk peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Abstract

The level of financial inclusion depicts public participation or access of financial products and services provided by financial institutions in a country. Such access is viewed essential, because it illustrates the opportunity of a more prosperous life for the society. The results of a survey conducted by the Financial Services Authority of Indonesia shows that financial inclusion in Indonesia has increased in considerably rapid pace in the last few years. However, is the improvement of conditions for financial inclusion in line with the improvements to the indicators of development in Indonesia? The study was intended to answer this question. Analysis tools used are descriptive statistics by making use of secondary data available on the Financial Services Authority and the Central Bureau of Statistics. Based on the results of the analysis it can be concluded that improvements to financial inclusion apparently has not been able to contribute positively towards the many indicators of development of Indonesia. Various improvements are necessary in order for increased financial inclusion to be transmitted effectively to the improvement of welfare of the population of Indonesia.

Keywords: access, financial inclusion, indicators of development.

1. Pendahuluan

Akses terhadap produk dan layanan keuangan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat moderen. Alasannya adalah karena ketersediaan akses tersebut memungkinkan individu atau organisasi untuk melakukan beragam transaksi keuangan, baik

yang bersifat produktif maupun konsumtif. Kemudahan akses keuangan memungkinkan transaksi berlangsung dengan cepat, sehingga volume transaksi keuangan menjadi lebih besar, dan demikian pula sebaliknya.

Di tingkat mikro, transaksi keuangan yang bersifat produktif dapat menciptakan kesempatan kerja dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Di tingkat makro, akumulasi transaksi keuangan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sayangnya, kondisi akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan tidak sama di semua negara. Masyarakat di negara-negara yang tergolong maju pada umumnya telah memiliki akses yang tinggi, namun tidak demikian halnya dengan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dan terbelakang.

Perbedaan akses menyebabkan inklusivitas keuangan pun berbeda antarnegara. Pemerintah di semua negara senantiasa berupaya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di kalangan masyarakatnya. Sebagian berhasil melakukannya dengan baik, namun sebagian lainnya masih menghadapi beragam kendala. Kondisi ini pun dialami oleh Pemerintah Indonesia, sehingga menarik untuk dikaji perkembangan tingkat inklusi keuangan yang dibandingkan dengan indikator pembangunan.

2. Tinjauan Pustaka

OJK sebagai regulator jasa keuangan di Indonesia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai: “*ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*” *The United Nations Millennium Development Goal Summit 2010* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai layanan keuangan yang dimaksud harus disediakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta berada di dalam lingkungan regulasi yang kondusif. *World Bank* (2014) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai individu dan usaha yang memiliki akses atas produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka, yaitu transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi, yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Megaldi de Sousa (2015) menuliskan bahwa inklusi keuangan telah mengundang perhatian serius pemerintahan di seluruh negara di dunia dalam kaitannya mendukung pembangunan ekonomi. Inklusi keuangan dianggap dapat membantu masyarakat dan perekonomian, karena mampu menciptakan eksternalitas positif. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2016) berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu Sahay dkk (2015) mencermati hubungan antara upaya perbaikan inklusi keuangan dengan kondisi ekonomi makro. Diutarakan bahwa kajian empirik mengenai dampak ekonomi makro inklusi keuangan masih sangat minim karena terbatasnya suplai data.

Inklusi keuangan menurut Yoo (2017) adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat menjadi independen secara keuangan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Inklusi keuangan membantu penduduk yang belum terlayani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya sehingga menjadi prioritas kunci dan sarana mengurangi kemiskinan. Untuk itu, *World Bank* telah menetapkan suatu tujuan untuk memastikan akses universal terhadap layanan keuangan pada tahun 2020.

Rajendran (2013) menyatakan bahwa mencapai inklusi keuangan tidak saja menolong pembangunan, tetapi juga untuk mencapai inklusi sosial. Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah menjadi agenda prioritas dari pemerintah di semua negara berkembang. Rajendran kemudian mensintesis sejumlah penelitian yang mengkaji dampak inklusi keuangan terhadap pembangunan. Levine (1998; 1999), Beck, Demirguc-Kunt dan Levine (2007), Deininger dan Squaire (1998), Dollar dan Kraay (2002), White dan Anderson

(2001), Ravallin (2001), serta Bourguignon (2001) mencatat adanya dampak positif dari keuangan terhadap pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Levine, Loayza, dan Beck (2000) serta Loayza dan Ranciere (2002) mengamati bahwa pengembangan bank yang lebih baik berhubungan erat dengan pertumbuhan.

Dalam penelitian-penelitian lainnya yang dikompilasi oleh Rajendran (2013), Boyd dan Prescott (1980), Greenwood dan Jovanoviz (1990), Kity dan Levite (1993), Levine dan Zervous (1998) dapat menunjukkan bahwa perbaikan fungsi bank dapat mempercepat proses alokasi sumber daya dan pertumbuhan. Selanjutnya, Hans dan Deepika (2011) menegaskan bahwa alokasi sumber daya yang merata dapat tercipta bagi semua segmen masyarakat dengan adanya inklusi keuangan. Karena itu, Dev (2010) mengemukakan bahwa inklusi keuangan dapat mengarahkan efisiensi yang lebih besar dari proses intermediasi keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian yang bersifat deskriptif komparatif karena memaparkan dan menganalisis data-data yang dikumpulkan serta membandingkan dan menganalisis data-data tersebut untuk mengetahui makna dibalikinya.

Data-data yang dikumpulkan seluruhnya adalah data-data sekunder yang bersumber dari *World Bank* dan OJK. Data dari *World Bank* adalah *Global Findex 2014*, sedangkan data dari OJK berupa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016. Indikator-indikator yang akan dianalisis dari data-data yang tersedia terdiri dari tingkat literasi dan inklusi keuangan serta tiga indikator pembangunan yang meliputi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan (*Gini ratio*). Adapun periode waktu yang akan dibandingkan adalah pada tahun 2013 dan 2016.

Asumsi yang digunakan sebagai landasan pengujian di dalam penelitian ini adalah bahwa peningkatan inklusi keuangan di Indonesia berdampak positif terhadap indikator-indikator pembangunan berupa penurunan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Apabila perbaikan inklusi keuangan secara empirik mampu memperbaiki kondisi pembangunan, maka penelitian ini dikatakan sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan demikian pula sebaliknya.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

Data yang disediakan oleh *World Bank* dalam bentuk *financial inclusion data/global findex* menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan penduduk Indonesia pada tahun 2014 adalah 36,1 persen. Angka tersebut merepresentasikan persentase penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun yang memiliki rekening pada lembaga keuangan terhadap total penduduk (177 juta jiwa). Tingkat inklusi keuangan Indonesia ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik (69,0 persen) dan bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tergolong berpendapatan rendah dan menengah (42,7 persen).

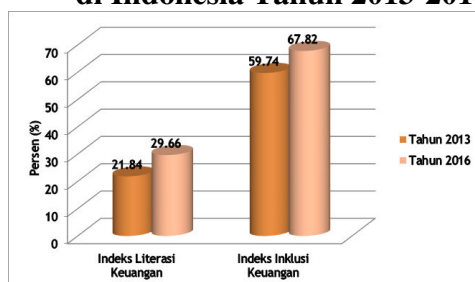
Berdasarkan data *Findex 2014* persentase pemilik rekening wanita dewasa, antara penduduk berusia muda (15-24 tahun) di kalangan penduduk miskin dan pedesaan juga masih tergolong rendah. tertinggal jauh dari negara-negara yang berpendapatan rendah hingga menengah. Kepemilikan rekening lembaga keuangan 35,9 persen merupakan kenaikan pesat dari tahun 2011 sebesar 19,6 persen.

Kepemilikan kartu debit meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan kondisi pada tahun 2011 (10,5 persen). Tercatat 70,9 persen penduduk Indonesia menggunakan ATM

sebagai instrumen utama pengambilan uang yang meningkat pesat dibandingkan 2011 (51,1 persen). Proporsi penduduk dewasa Indonesia yang menabung di lembaga keuangan (26,6 persen) dan telah meningkat pesat, karena pada tahun 2011 hanya 15,3 persen penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan.

OJK selaku regulator jasa keuangan di Indonesia telah melakukan dua kali survei nasional literasi dan inklusi keuangan, yaitu pada tahun 2013 dan 2016. Survei pada tahun 2013 mencakup 8.000 responden yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi. Sedangkan survei pada tahun 2016 meliputi 9.680 responden yang berdomisili di 64 kabupaten/kota pada 34 provinsi se-Indonesia.

Gambar 1. Indeks Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan di Indonesia Tahun 2013-2016



Sumber: OJK

Hasil survei OJK cukup menggembirakan, di mana tingkat literasi keuangan mengalami peningkatan dari 21,84 persen pada tahun 2013 menjadi 29,66 persen pada tahun 2016. Sedangkan tingkat inklusi keuangan juga membaik dari 59,74 persen menjadi 67,82 persen pada periode yang sama. OJK juga dapat mengumpulkan data mengenai indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan menurut provinsi dan sektor. Di samping itu, dapat disajikan pula data indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah.

Jika dilihat menurut provinsi, indeks literasi keuangan yang tinggi pada umumnya dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yaitu angka tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi di luar Jawa yang mempunyai indeks literasi keuangan yang tinggi adalah Kepulauan Riau. Sebaliknya, indeks literasi keuangan terendah ditemukan di Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Berdasarkan sektor, indeks literasi keuangan yang tertinggi pada tahun 2016 terdapat pada sektor perbankan diikuti oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pergadaian. Sektor dengan indeks literasi keuangan terendah adalah pasar modal (4,40 persen). Angka indeks literasi keuangan untuk semua sektor mengalami peningkatan pada periode 2013-2016, kecuali untuk perasuransian yang mengalami penurunan. Sektor perbankan mengalami peningkatan indeks literasi keuangan yang terbesar, yaitu dari 21,80 persen pada tahun 2013 menjadi 28,94 persen pada tahun 2016.

Tingkat inklusi keuangan penduduk di provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia lebih tinggi dibandingkan di kawasan timur, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Timur. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa angka indeks inklusi keuangan tertinggi terdapat di DKI Jakarta, diikuti dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sumatera Utara. Provinsi-provinsi yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya memperbaiki tingkat inklusi keuangan adalah Papua Barat dan Kalimantan Selatan. Di samping itu, perhatian perlu pula diberikan untuk beberapa provinsi lainnya, seperti Kalimantan Tengah, Papua, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo.

Seperti halnya pada literasi keuangan, indeks inklusi keuangan sektoral yang tertinggi pada tahun 2016 dijumpai pada perbankan dan BPJS Kesehatan. Indeks inklusi keuangan untuk perbankan tersebut meningkat dari 57,28 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan belum terdapat data empirik sebagai pembanding, karena baru pertama kali disurvei.

Indeks inklusi keuangan perbankan dan BPJS Kesehatan jauh meninggalkan indeks inklusi keuangan untuk sektor-sektor lainnya pada tahun yang sama. Perasuransian memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 12,08 persen pada tahun 2016, meningkat dari 11,81 persen pada tahun 2013. Kemudian indeks inklusi keuangan untuk lembaga pembiayaan adalah 11,85 persen pada tahun 2016, meningkat dari 6,33 persen pada tahun 2013. Pasar modal merupakan sektor yang mempunyai indeks inklusi keuangan terendah, yaitu hanya 1,25 persen pada tahun 2016, sedikit meningkat dibandingkan kondisi 2013 yang sebesar 0,11 persen. Adapun sektor dana pensiun, pergadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki indeks inklusi keuangan yang tidak seburuk pasar modal, namun masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perbankan dan BPJS Kesehatan.

Meskipun menjadi negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, namun indeks literasi keuangan maupun inklusi keuangan syariah di Indonesia masih memprihatinkan. Indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2016 hanya 8,11 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sedikit lebih tinggi, yaitu 11,06 persen. Berarti bahwa belum banyak penduduk Indonesia yang mengenal dan menggunakan beragam produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh LJK yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.

Mayoritas penduduk Indonesia (84,16 persen) telah mengenal fitur keuangan beserta manfaatnya (86,57 persen), dan denda yang dikenakan apabila melanggar perjanjian (66,04 persen). Namun, pangsa penduduk yang mengetahui haknya 40,75 persen serta cara memperoleh produk dan jasa keuangan (40,58 persen) masih lebih rendah. Demikian pula dalam hal pengetahuan mengenai risiko (36,25 persen), kewajiban (36,38 persen), dan biaya yang harus ditanggung (37,81 persen).

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2016, OJK mendapati hanya 36,02 persen responden yang mewakili masyarakat Indonesia yang menyatakan memiliki kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda, dan inflasi. Sejumlah 93,55 persen responden lainnya dapat menjawab soal aritmetika sederhana dengan benar. Kemudian, meskipun hanya 30 persen menyatakan dapat menghitung bunga, namun 62,61 persen responden ternyata dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai perhitungan bunga.

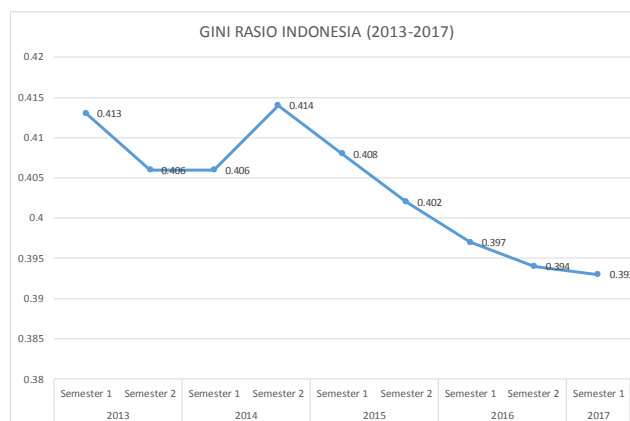
Survei OJK juga menunjukkan bahwa produk dan layanan keuangan di Indonesia masih lebih dominan disediakan atau digunakan melalui pendekatan konvensional. Perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan juga masih melayani kantor-kantor mereka yang tersebar di seluruh Indonesia. Koefisien Gini adalah pengukuran secara statistik atas derajat variasi atau disparitas yang khususnya digunakan untuk menganalisa pemerataan pendapatan. Kenaikan Koefisien Gini menunjukkan bahwa pendapatan semakin tersebar secara tidak merata. Gini Koefisien 0 mengindikasikan pemerataan yang sempurna, sedangkan koefisien 1 mengindikasikan disparitas sempurna. Dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, akses keuangan dipercaya berhubungan erat dengan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, kenaikan angka inklusi keuangan, seharusnya diikuti juga dengan penurunan angka Koefisien Gini.

Disparitas pendapatan Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2000an dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 1990an rasio Gini Indonesia berada pada rata-rata angka 0,3, dan mengalami peningkatan pada rata-rata 0,38 di tahun 2000an. Antara tahun 2011 hingga 2015 rasio Gini stabil di angka 0,41 sebelum kemudian menurun pada

tahun 2016 ke angka 0.40. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa peningkatan disparitas distribusi pendapatan antara 1990an dan 2000an ini merupakan angka yang termasuk tertinggi di antara negara-negara Asia, setelah Cina.

Di samping disparitas yang tinggi secara nasional, disparitas antar wilayah juga terjadi dalam skala yang besar. Investasi terbesar berada di pulau Jawa sehingga menyebabkan kesenjangan antara Jawa dan pulau-pulau lainnya. Wilayah di pulau Jawa merupakan penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, yaitu hingga 60%.

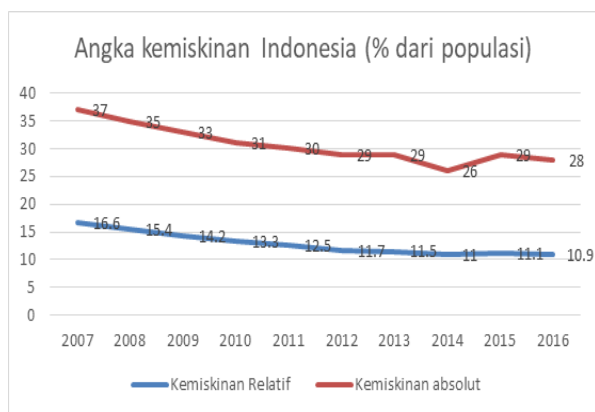
Gambar 2. Rasio Gini di Indonesia Tahun 2013-2017



Sumber: BPS.

Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 1990an ke angka 20%. Namun angka ini mengalami peningkatan pesat setelah krisis ekonomi di antara tahun 1997 dan 1998, dimana angka kemiskinan mencapai 26%. Setelah 2006 kemiskinan di Indonesia menunjukkan angka penurunan secara bertahap. Namun perlu menjadi catatan bahwa pemerintah Indonesia menetapkan garis kemiskinan yang sangat rendah, yaitu 354,386 Rupiah (\$26) pendapatan per kapita per bulan. Jika garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia diterapkan untuk penduduk Indonesia, yaitu hidup di bawah 1,25 Dolar per hari, atau bahkan 2 Dolar per hari, maka persentase penduduk miskin Indonesia akan meningkat. Pada kenyataannya populasi Indonesia yang hidup dalam atau mendekati miskin, sangat besar jumlahnya. Sekalipun di beberapa dekade terakhir angka kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan, diperkirakan tren penurunan ini akan mengalami perlambatan.

Gambar 3. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007-2016



Sumber: BPS.

Perlu diperhatikan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki perbedaan yang besar jika membandingkan lokasi geografis. Wilayah timur Indonesia menunjukkan angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah barat. Semua propinsi-propinsi Indonesia yang memiliki angka kemiskinan tertinggi berada diluar pulau Jawa, Sumatra dan Bali.

Gambar 3. Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2006-2015



Sumber: BPS

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara berlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (yang sebagian besar merupakan mereka yang baru lulus kuliah) merupakan tantangan penting dan memerlukan solusi yang tidak tertunda.

Dengan total penduduk berkisar 255 juta orang, Indonesia adalah negara dengan penduduk keempat terpadat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Negara ini juga memiliki populasi penduduk yang berusia muda karena sekitar separuh dari seluruh penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Faktor-faktor ini membuat Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, dan yang akan terus berkembang, sehingga perlu diciptakan lapangan kerja.

Angka pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan yang terjadi secara berangsur-angsur. Pengangguran wanita khususnya berkurang secara drastis, bahkan mulai mendekati angka pengangguran pria. Meskipun demikian, masalah persamaan gender, masih menjadi masalah penting di Indonesia, seperti juga di

negara-negara lain. Meski terdapat kemajuan dalam beberapa sektor utama (seperti pendidikan dan kesehatan), wanita masih cenderung bekerja di bidang informal (dua kali lebih banyak dari pria), dengan mengerjakan pekerjaan tingkat rendah dan dibayar dengan upah yang lebih rendah dibanding pria yang melakukan pekerjaan yang sama.

Kesimpulan

Inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2016 telah mengalami perkembangan pesat. Peningkatan jangkauan dan kedalaman layanan dapat terlihat dengan meningkatnya jumlah titik layanan dan jenis produk. Pengetahuan atas layanan juga semakin meningkat dengan tingkat literasi yang bertambah. Sementara inklusi keuangan dan literasi keuangan mengalami peningkatan, Indonesia mengalami perbaikan indikator-indikator pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran serta rasio Gini. Sekalipun tidak dalam tren yang drastis, angka kemiskinan, pengangguran dan rasio Gini turun secara bertahap dan pasti. Perbaikan indikator pembangunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan tidak dapat sepenuhnya dihubungkan dengan adanya perbaikan inklusi keuangan dan literasi keuangan. Namun tren ini dapat dikatakan mendukung teori yang telah didasari studi-studi sebelumnya, bahwa peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh positif kepada indikator pembangunan.

Dengan masih rendahnya angka indikator pembangunan di Indonesia, serta rendahnya angka inklusi dan literasi keuangan dibanding negara-negara berkembang lainnya, masih terdapat kebutuhan akan kerja keras berbagai pihak pemangku kepentingan dalam memperbaiki angka-angka ini. Diantaranya diperlukan kerja keras untuk meningkatkan jangkauan layanan serta peningkatan literasi untuk segmen masyarakat yang termarginalisasi, seperti para pemuda, wanita, dan masyarakat pedesaan. Selain itu juga perlu adanya peningkatan inklusi dan literasi di propinsi-propinsi di Indonesia Timur dan sebagian wilayah barat di luar pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Perbaikan angka inklusi dan literasi diharapkan dapat memperbaiki juga indikator-indikator pembangunan di wilayah-wilayah ini.

Daftar Pustaka

- Alliance for Financial Inclusion. (2011). *Measuring Financial Inclusion Core Set of Financial Inclusion Indicators*. Financial Inclusion Data Working Group.
- Inter Media. (2017). Financial Inclusion Insights. www.finclusion.org.
- Magaldi de S., Mariana. (2015). Financial Inclusion and Global Regulatory Standards: An Empirical Study Across Developing Economies. *Paper No. 7*, March, New Thinking and the New G20 Series. Center for International Governance Innovations (CIGI).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*. Jakarta.
- Park, C.Y dan Rogelio V. M, Jr. (2015). Financial Inclusion, Poverty, and Income Equality in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Rajendran, K. (2013). Financial Inclusion, Financial Exclusion and Inclusive Growth. *SSRN Electronic Journal*, April.
- Sahay, R, Martin C., Papa N'Diaye, Adolfo B, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian Mooi, dan Seyed Reza Yousefi. (2015). Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals? *IMF Discussion Note*, SDN/15/17, September.
- UNCTAD. (2015). Access to Financial Services as a Driver for the Post-2015 Development Agenda. *Policy Brief*, No. 35, September. UNCTAD.
- World Bank. (2014). Financial Inclusion. *Global Financial Development Report*.
- World Bank. (2014). Measuring Financial Inclusion around the World. *The Global Findex Database*.
- Yoo, T, 2017. *Point of View: Digitizing Financial Inclusion*. San Joce: CISCO.

LAMPIRAN

A. Indikator Inklusi Keuangan berupa Kepemilikan dan Penggunaan Rekening di Indonesia Tahun 2014

No.	Indikator Inklusi Keuangan	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik	Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah
1.	Rekening			
1.1.	Penduduk dewasa (usia 15+ tahun)	36,1%	69,0%	42,7%
1.2.	Wanita	37,5%	67,0%	36,3%
1.3.	Penduduk dewasa 40% termiskin	22,2%	60,9%	33,2%
1.4.	Penduduk muda (usia 15-24 tahun)	35,2%	60,7%	34,7%
1.5.	Penduduk dewasa di perdesaan	28,7%	64,5%	40,4%
2.	Rekening lembaga keuangan			
2.1.	Penduduk dewasa	35,9%	68,8%	41,8%
2.2.	Penduduk dewasa tahun 2011	19,6%	55,1%	28,7%
3.	Rekening <i>mobile</i>			
3.1.	Penduduk dewasa	0,4%	0,4%	2,5%
4.	Akses terhadap rekening lembaga keuangan			
4.1.	Memiliki kartu debit	25,9%	42,9%	21,2%
4.2.	Memiliki kartu debit tahun 2011	10,5%	34,7%	10,1%
4.3.	Memiliki ATM sebagai cara utama mengambil uang	70,9%	53,3%	42,4%
4.4.	Memiliki ATM sebagai cara utama mengambil uang tahun 2011	51,1%	37,0%	28,1%
5.	Penggunaan rekening setahun lalu			
5.1.	Menggunakan rekening untuk menerima upah	6,6%	15,1%	5,6%
5.2.	Menggunakan rekening untuk transfer pemerintah	3,0%	8,1%	3,3%
5.3.	Menggunakan Rrekening untuk membayar tagihan	2,9%	11,8%	3,1%

Sumber: *Global Findex 2014*.

B. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016

No.	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan
1.	Nangroe Aceh Darussalam	73,09
2.	Sumatera Utara	75,27
3.	Sumatera Barat	66,91
4.	Riau	69,45
5.	Jambi	66,91
6.	Sumatera Selatan	72,36
7.	Bengkulu	67,27
8.	Bangka Belitung	69,09
9.	Lampung	69,82
10.	Kepulauan Riau	74,55
11.	DKI Jakarta	78,18
12.	Jawa Barat	68,31
13.	Jawa Tengah	66,23
14.	DI Yogyakarta	76,37
15.	Jawa Timur	73,25
16.	Banten	69,45
17.	Bali	76,00
18.	Nusa Tenggara Barat	63,27
19.	Nusa Tenggara Timur	62,18
20.	Kalimantan Barat	65,45
21.	Kalimantan Tengah	60,36
22.	Kalimantan Selatan	59,27

Sumber: OJK.

C. Indeks Literasi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016

No.	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan
1.	Nangroe Aceh Darussalam	32,73%
2.	Sumatera Utara	32,36%
3.	Sumatera Barat	27,27%
4.	Riau	29,45%
5.	Jambi	26,91%
6.	Sumatera Selatan	31,27%
7.	Bengkulu	27,64%
8.	Bangka Belitung	29,45%
9.	Lampung	26,91%
10.	Kepulauan Riau	37,09%
11.	DKI Jakarta	40,00%
12.	Jawa Barat	38,70%
13.	Jawa Tengah	33,51%
14.	DI Yogyakarta	38,55%
15.	Jawa Timur	35,58%
16.	Banten	38,18%
17.	Bali	37,45%
18.	Nusa Tenggara Barat	21,45%
19.	Nusa Tenggara Timur	28,00%
20.	Kalimantan Barat	30,55%
21.	Kalimantan Tengah	26,18%
22.	Kalimantan Selatan	23,27%

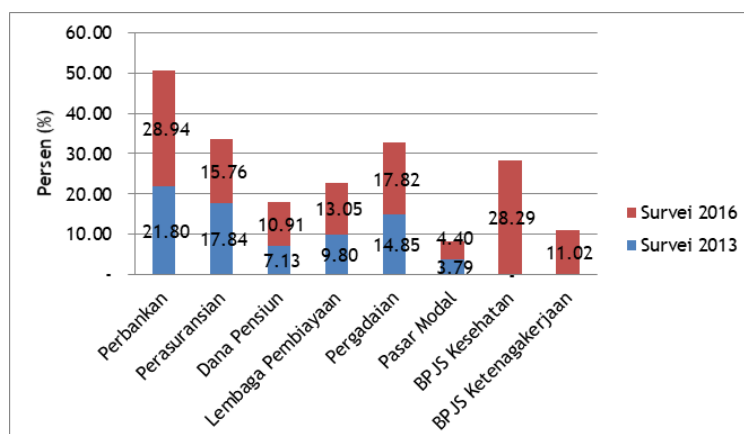
Sumber: OJK.

D. Indikator Inklusi Keuangan berupa Tabungan dan Kredit di Indonesia Tahun 2014

No.	Indikator Inklusi Keuangan (Penduduk Dewasa Setahun Lalu)	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik	Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah
1.	Tabungan			
1.1.	Menabung di lembaga keuangan	26,6%	36,5%	14,8%
1.2.	Menabung di lembaga keuangan tahun 2011	15,3%	28,5%	11,1%
1.3.	Menabung pada kelompok atau orang lain di luar keluarga	25,2%	6,0%	12,4%
1.4.	Menabung untuk semua keperluan	69,3%	71,0%	45,6%
1.5.	Menabung untuk hari tua	27,1%	36,5%	12,6%
1.6.	Menabung untuk pertanian atau bisnis	22,6%	21,3%	11,8%
1.7.	Menabung untuk pendidikan atau uang sekolah	33,3%	30,7%	20,0%
2.	Kredit			
2.1.	Meminjam dari lembaga keuangan	13,1%	11,0%	7,5%
2.2.	Meminjam dari lembaga keuangan tahun 2011	8,5%	8,6%	7,3%
2.3.	Meminjam dari keluarga atau teman	41,5%	28,3%	33,1%
2.4.	Meminjam dari pemberi pinjaman informal swasta	2,9%	2,5%	8,5%
2.5.	Meminjam untuk berbagai keperluan	56,6%	41,2%	47,4%
2.6.	Meminjam untuk pertanian atau bisnis	11,7%	8,3%	9,2%
2.7.	Meminjam untuk pendidikan atau uang sekolah	12,2%	7,1%	10,1%
2.8.	Pinjaman perumahan pada lembaga keuangan	5,5%	8,0%	4,7%

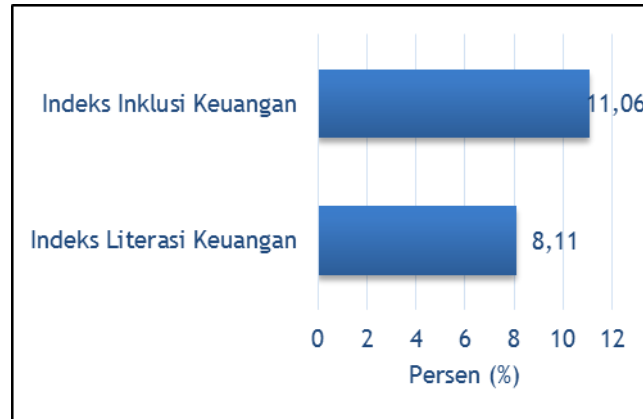
Sumber: *Global Findex 2014*.

E. Indeks Literasi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2013 dan 2016



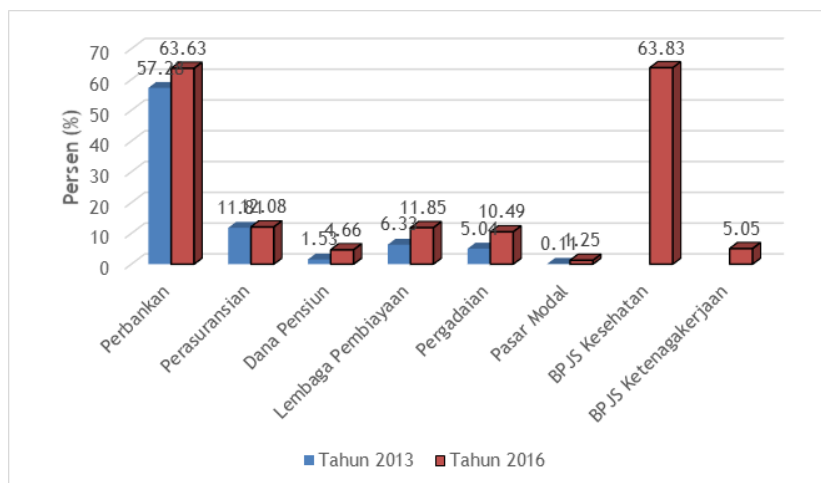
Sumber: OJK.

F. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2016



Sumber: OJK.

G. Indeks Inklusi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2016



Sumber: OJK.